

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia, salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan, seperti halnya negara-negara berkembang lainnya menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan usaha pembangunan ekonomi. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia adalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah umum dan fundamental yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Beberapa masalah yang muncul meliputi kesempatan kerja yang sedikit, tingkat upah yang rendah dan produktivitas yang kurang. Masalah ini bersifat kompleks dan melibatkan aspek-aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan, dan politik (Tjiptoherjanto, 2004).

UUD 1945 Pasal 27 ayat 2: Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kesempatan kerja merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak ada bedanya dengan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Selain itu, hal ini juga menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan kebijakan ekonomi pemerintah. Dengan penambahan jumlah penduduk, angkatan kerja juga meningkat. Dengan demikian semakin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang diharapkan pencari kerja dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang sesuai dengan keinginan serta keterampilan mereka. Hal ini berarti perekonomian harus terus menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja baru (Adisetiawan, 2018).

Pulau Jawa merupakan pulau dengan populasi terbesar di Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, dengan jumlah total mencapai 154,34 juta jiwa. Pulau Jawa memiliki tingkat angkatan kerja yang tinggi karena jumlah angkatan kerja tergantung pada komposisi penduduknya. Di Indonesia, khususnya pada Pulau Jawa jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk harus juga disertai dengan peluang kerja yang tersedia. Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah bekerja menurut Pulau di Indonesia tahun 2022.

Tabel 1. 1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Sudah Bekerja menurut Pulau di Indonesia Tahun 2022

No	Pulau	Bekerja (Orang)	Presentase (%)
1	Sumatera	28.745.170	98,28
2	Jawa	76.513.161	94,99
3	Nusa Tenggara & Bali	8.240.713	96,29
4	Kalimantan	8.095.127	95,04
5	Sulawesi	9.756.663	95,79
6	Maluku & Papua	3.231.316	95,78
	Total	134.582.150	

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah)

Tabel 1.1 menunjukkan data penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah bekerja menurut pulau di Indonesia tahun 2022. Jumlah penduduk yang bekerja tertinggi berada di Pulau Jawa sebesar 76,51 juta orang, akan tetapi presentase penduduk yang sudah bekerja di Pulau Jawa memiliki tingkat yang paling rendah yaitu sebesar 94,99 persen, ini berarti angkatan kerja yang masih belum bekerja

sebesar 5,01 persen. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang atau tenaga kerja yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau suatu instansi, kesempatan kerja ini akan meyerap semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia (Tambunan, 2001).

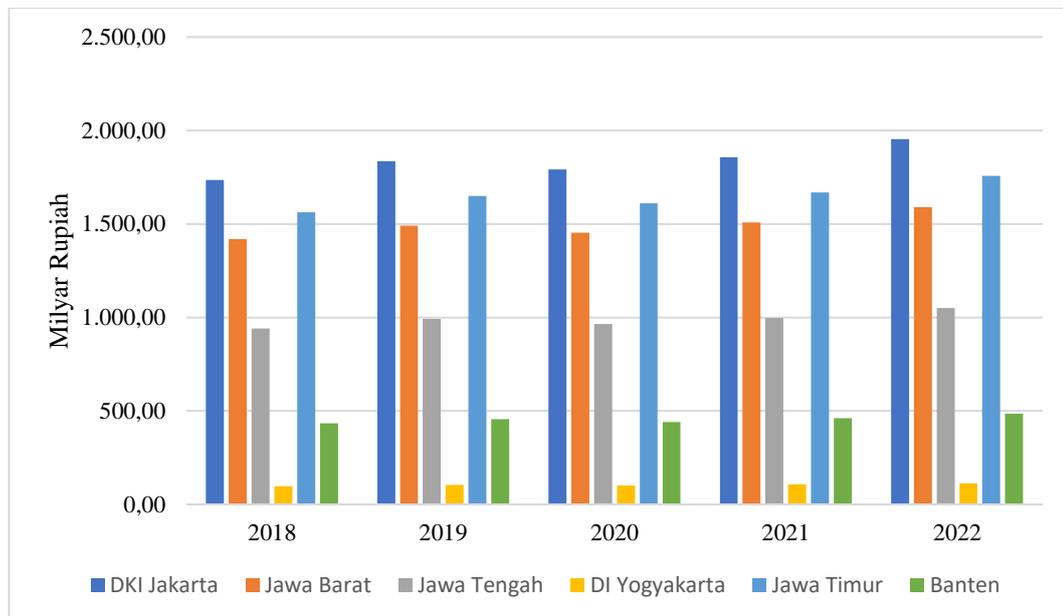
Kebijakan upah minimum pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal 1970an. Tujuan dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk menyelamatkan dan melindungi para pekerja/buruh sehingga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup pekerja/buruh tanpa mengabaikan kepentingan perusahaan dan perekonomian pada umumnya. Penerapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, masalah upah minimum tidak hanya terbatas pada masalah upah saja, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya akan berdampak pada kesempatan kerja.

Upah minimum mempunyai pengaruh terhadap kesempatan kerja. Jika semakin tinggi tingkat upah minimum yang ditentukan, maka sangat berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Akibatnya, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai tindakan efisiensi, yang berakibat pada rendahnya jumlah angkatan kerja yang bekerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja (Simanjuntak, 2001).

Inflasi adalah keadaan yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum barang-barang yang berlangsung terus menerus selama satu periode tertentu, (Nopirin, 2006). Inflasi menjadi masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Oleh karena itu, tingkat inflasi suatu negara menjadi salah satu indikator untuk menilai keadaan ekonomi negara tersebut, dan pemerintah perlu menjalankan kebijakan yang tepat guna mengawasi dan mengendalikan laju inflasi. Jika diasumsikan inflasi yang diukur adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya angka inflasi akan berdampak pada peningkatan suku bunga pinjaman, kenaikan biaya produksi bagi produsen atau perusahaan, dan penurunan daya beli masyarakat. Menurut Sukirno (1998) bahwa dengan semakin tingginya tingkat inflasi yang terjadi maka akan berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurun sehingga akan terjadi peningkatan terhadap angka pengangguran karena kurangnya kesempatan kerja.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kegiatan peningkatan produk domestik bruto dengan meningkatnya jumlah faktor produksi yang digunakan, maka secara tidak langsung akan membuat kebutuhan tenaga kerja menjadi meningkat (Afiat, 2017). Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang erat dengan faktor produksi salah satunya adalah tenaga, yang sangat menentukan perkembangan ekonomi pada suatu daerah. Jumlah tenaga kerja yang besar dapat menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Semakin tinggi jumlah produksi, semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan. Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh sektor lapangan kerja dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan meningkatkan

taraf hidup masyarakat. Gambar 1.1 menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada enam Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Gambar 1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Provinsi di Pulau Jawa tahun 2018-2022

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa PDRB pada enam provinsi di Pulau Jawa berbeda-beda dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Terlihat jelas bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai PDRB DKI Jakarta dengan provinsi lainnya. DKI Jakarta memiliki PDRB yang jauh lebih tinggi daripada provinsi lainnya, diikuti oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DI Yogyakarta. DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia dan merupakan pusat ekonomi di negara ini. Data tersebut menggambarkan kesenjangan kondisi ekonomi di setiap daerah yang diwakili oleh keenam provinsi tersebut di Pulau Jawa. Namun diperhatikan bahwa meskipun suatu daerah memiliki PDRB tinggi, hal itu tidak

menjamin bahwa daerah tersebut mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia.

Intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif adalah melalui pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah mencakup konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah, serta pembiayaan yang digunakan untuk administrasi pemerintahan dan kegiatan pembangunan (Sukirno, 2002). Kapasitas keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan Undang-Undang No.32 dan 33 tahun 2004 APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD mencakup rincian semua penerimaan daerah di satu sisi dan semua pengeluaran daerah di sisi lainnya. Sebelum tahun 2003, APBD terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan dari segi pengeluaran (Utama, 2009).

Kebijakan distribusi pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran ke daerah-daerah yang dapat menciptakan kesempatan kerja, tetapi apabila distribusi belum dapat dilakukan secara merata maka ketimpangan pendapatan kabupaten/kota tetap akan terjadi dan cenderung meningkat dan tidak lagi memberi ruang untuk masyarakat terutama berpenghasilan rendah ikut ambil bagian dalam proses pembangunan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, serta guna mengetahui sampai mana setiap faktor dapat menjadi pengaruh atas kesempatan kerja di Pulau

Jawa, maka mengacu pada penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Kesempatan Kerja di Pulau Jawa: Analisis Data Panel 2008-2022”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang, dapat disimpulkan identifikasi masalah diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh UMR, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa pada tahun 2008-2022?
2. Bagaimana pengaruh UMR, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa pada tahun 2008-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dilihat dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh UMR, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa pada tahun 2008-2022.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh UMR, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa pada tahun 2008-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja di Pulau Jawa dan dapat mengaplikasikan teori dan pengetahuan penulis yang diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian dapat digunakan sebagai informasi tambahan maupun masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan kesempatan kerja khususnya di Pulau Jawa.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta dapat digunakan sebagai referensi atau bahan informasi untuk peneliti lain yang hendak melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di enam provinsi yang ada di Pulau Jawa diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan Februari tahun 2022 dimulai dengan pengajuan judul ke prodi Ekonomi Pembangunan. Dengan jadwal matriks sebagai berikut :

Tabel 1. 2
Jadwal Penelitian

Keterangan	Tahun 2023																			
	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pembuatan Usulan Penelitian	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Bimbingan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Seminar Usulan Penelitian													■							
Revisi Usulan Penelitian														■	■	■				
Analisis Data														■	■	■				
Penyusunan Skripsi															■	■	■			
Bimbingan																	■	■		
Sidang Skripsi																			■	